



LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I PALEMBANG

RINGKASAN EKSEKUTIF

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017, dan terakhir diubah melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02 Tahun 2018 dengan tugas dan fungsi melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian dibidang penggunaan frekuensi radio diwilayahnya Provinsi Sumatera Selatan. Tugas dan tanggung jawab yang sangat strategis dapat terwujud dengan kerjasama yang baik antara seluruh stakeholder. Dan merupakan Rencana kerja tahunan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang telah menyusun Program Kerja dan Kegiatan tahun 2020 disesuaikan dengan target/capaian yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap capaian Program Kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang, dapat dilihat dari capaian sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2020. Capaian indikator kinerja dimaksud terdapat dalam tabel dibawah ini:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
1.	Meningkatkan Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1 Presentase (%) Okupansi penggunaan frekuensi radio di Kabupaten/kota	50%	76%	152
		2 Prosentase (%) pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja	35%	37%	107
		3 Persentase (%) jumlah ISR yang termonitor	60%	93%	155
		4 Persentase (%) hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi	90%	90%	100
		5 Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	83%	97%	117
		6 Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable	12 Laporan	12 Laporan	100
		7 Persentase (%) penanganan gangguan spektrum frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritime	100%	100%	100
		8 Persentase (%) penertiban spektrum frekuensi radio	50%	100%	200
		9 Monitoring Perangkat Telekomunikasi	1 Keg	5 Keg	500
		10 Persentase (%) peserta sosialisasi memahami informasi di bidang SDPPI	80%	80%	100
		11 Pelaksanaan sertifikat operator radio berbasis CAT	100%	100%	100
		12 Penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio	12 Laporan	12 Laporan	100
		13 Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL	4 Laporan	4 Laporan	100
		14 Pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR	85%	93%	109
2.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	86	88	102

Note : Persentase = Capaian dibagi Target



Guna mendukung realisasi sasaran program tersebut di atas, maka pada tahun anggaran 2020 Balmon Palembang mengelola anggaran sebesar Rp. 10.514.972.000,- (sepuluh milyar lima ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Penyerapan anggaran pada akhir tahunnya adalah sebesar Rp. 9.940.328.953,- (Sembilan milyar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).

Ringkasan pencapaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang diuraikan sebagaimana tersebut dibawah ini. Sedangkan penjelasan secara lengkap diuraikan lebih jauh pada Bab III.

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan Allah SWT serta kerjasama seluruh pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang, sehingga Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang dapat menyelesaikan program kerja Tahun 2020 dan dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang tahun 2020.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "good governance" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang tahun 2020 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan, penggunaan seluruh sumber daya kepada semua pihak yang berkepentingan. Sumber daya tersebut di atas meliputi keseluruhan anggaran keuangan, waktu, dan tenaga/SDM yang digunakan dalam memenuhi pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang yang harus dipertanggungjawabkan penggunaan sesuai dengan prosedur dan peraturan serta ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Kinerja yang selanjutnya disebut Lakin, telah mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tanggal 20 November 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. diharapkan juga dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepadamasyarakat.

Kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan. Semoga Laporan ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Palembang, Januari 2021

KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO KELAS I PALEMBANG

Ir. MUHAMMAD SOPINGI, MM

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	2
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
C. PROFIL PROVINSI SUMATERA SELATAN.....	4
D. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS	6
E. SISTEMATIKA PELAPORAN	7
BAB II PERJANJIAN KINERJA.....	8
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024	9
B. SASARAN PROGRAM.....	12
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	18
SASARAN 1. MENINGKATNYA LAYANAN MONITORING, PENGUKURAN, INSPEKSI, PENERTIAN SERTA PELAYANAN PUBLIK SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	19
1. IK-1 Persentase Okupansi Penggunaan Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota	19
2. IK-2 Persentase Pengukuran Stasiun Radio dan Televisi Siaran di Wilayah Kerja.....	20
3. IK-3 Persentase Jumlah ISR yang termonitor	22
4. IK-4 Persentase Hasil Monitoring Frekuensi yang teridentifikasi	23
5. IK-5 Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT	24
6. IK-6 Jumlah Laporan Monitoring Frekuensi Radio dari setiap Stasiun SMFR Tetap dan Transportable.....	26
7. IK-7 Persentase penanganan gangguan spektrum frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritim	27
8. IK-8 Persentase penertiban spektrum frekuensi radio	28
9. IK-9 Monitoring Perangkat Telekomunikasi	29
10. IK-10 Persentase peserta sosialisasi memahami informasi di bidang SDPPI.....	30
11. IK-11 Persentase Pelaksanaan sertifikasi operator radio berbasis CAT.....	30
12. IK-12 Penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio	32
13. IK-13 Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL.....	33
14. IK-14 Pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR	34
SASARAN 2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA UPT MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG BERSIH, EFISIEN DAN EFEKTIF	35
IK-1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)	35
B. CAPAIAN KINERJA LAINNYA.....	36
C. ANALISA DAN EVALUASI	49
BAB IV PENUTUP.....	51
DOKUMENTASI.....	54

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Tabel 1. Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan di Provinsi Sumatera Selatan	5
---	---

BAB II PERJANJIAN KINERJA

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	15
--	----

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 3. Realisasi Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2020	18
Tabel 4. Okupansi Penggunaan Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota Tahun 2020	19
Tabel 5. Pengukuran Stasiun Radio dan Televisi Siaran di Wilayah Kerja Tahun 2020	20
Tabel 6. Pengukuran Stasiun Radio Siaran Tahun 2020	21
Tabel 7. Pengukuran Stasiun Televisi Siaran Tahun 2020	22
Tabel 8. Jumlah ISR yang Termonitor Tahun 2020	23
Tabel 9. Hasil Monitoring Frekuensi yang Teridentifikasi Tahun 2020	23
Tabel 10. Daftar Alat Monitoring/Ukur dan Kondisi	24
Tabel 11. Jadwal Pemeliharaan Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur Tahun 2020	25
Tabel 12. Jumlah Laporan Monitoring Frekuensi Radio dari Setiap Stasiun SMFR Tetap dan Transportable	27
Tabel 13. Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keselamatan Penerbangan Maritim Tahun 2020	28
Tabel 14. Kegiatan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2020	28
Tabel 15. Kegiatan Monitoring Perangkat Telekomunikasi Tahun 2020	29
Tabel 16. Hasil Pelaksanaan Sertifikasi Operator Radio Berbasis CAT Tahun 2020	31
Tabel 17. Data Pendistribusian SPP dan ST Tahun 2020	33
Tabel 18. Nilai BHP Frekuensi Radio Terbayar dan Masih Terhutang Tahun 2020	33
Tabel 19. Pelimpahan Piutang BHP Tahun 2020	34
Tabel 20. Inspeksi Stasiun Radio Terkait Validasi Data ISR Tahun 2020	34
Tabel 21. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020	38
Tabel 22. Realisasi Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2020	38
Tabel 23. Realisasi Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas Palembang Berdasarkan Jenis Output Tahun 2020	39
Tabel 24. Daftar Barang Milik Negara Tahun 2020	40
Tabel 25. Daftar Kenaikan Pangkat (KP) Pegawai Tahun 2020	44
Tabel 26. Daftar Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Pegawai Tahun 2020	44
Tabel 27. Rekapitulasi Jumlah Fungsional Pengendali Tahun 2020	45
Tabel 28. Rekapitulasi Jumlah Fungsional Umum Tahun 2020	45
Tabel 29. Data PPNS Tahun 2020	45
Tabel 30. Daftar yang Menerima Penghargaan Balai Monitor Kelas I Palembang Tahun 2020	46
Tabel 31. Pegawai Purnabhakti Tahun 2020	46
Tabel 32. Pegawai Mutasi Kerja Tahun 2020	46
Tabel 33. Data Pegawai yang Mengikuti Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Workshop Tahun 2020	47
Tabel 34. Perbandingan Data Capaian Kinerja Tahun 2016 s.d 2020	49



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, telah membawa dampak pada system administrasi manajemen pemerintahan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan keterbukaan (transparansi), efisiensi dan pelayanan yang lebih baik. Menyadari situasi dan kondisi yang berkembang dewasa ini, Pemerintah cukup responsive dan secara bertahap melakukan pembenahan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan menuju terwujudnya good governance.

Untuk terwujudnya Good Governance ini diantaranya dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Monitor SFR Kelas I Palembang sebagai wujud pertanggungjawaban atas kepercayaan dan amanat yang telah diberikan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Salah satu azas penyelenggaraan Good Governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui laporan akuntabilitas dapat dilakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan termasuk efektivitas pelaksanaan program kerja ataupun kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen SDPPI sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan perangkat / peralatan monitor spektrum frekuensi radio;
- b. Melaksanakan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan / monitor spektrum frekuensi radio;
- c. Melaksanakan kalibrasi dan perbaikan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- d. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis monitor spektrum frekuensi radio;
- e. Koordinasi monitoring spektrum frekuensi radio;
- f. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio;
- g. Pelayanan / pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio; dan
- h. Melaksanakan evaluasi dan pengujian ilmiah serta pengukuran spektrum frekuensi radio.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terdiri dari :

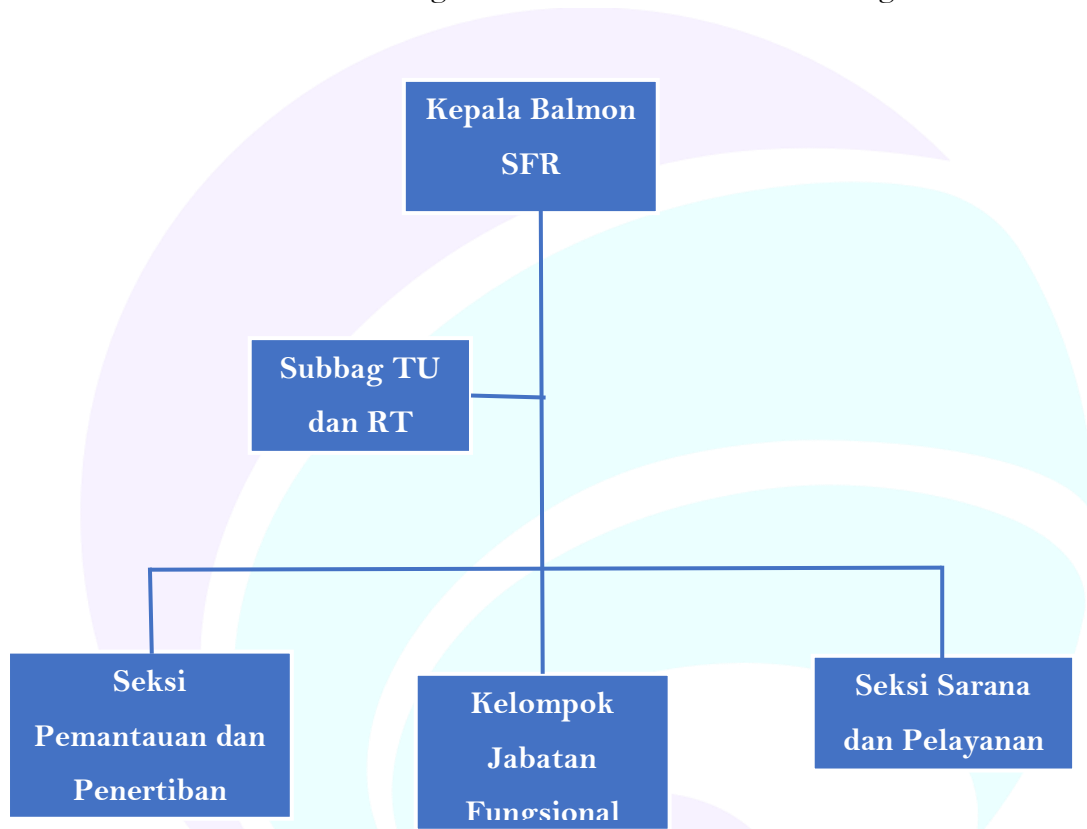
1. Sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat.
2. Seksi Pemantauan dan Penertiban
Mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data pengguna frekuensi radio.
3. Seksi Sarana dan Pelayanan
Mempunyai tugas menyampaikan Izin Stasiun Radio (ISR), Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi, Pendampingan Penyelesaian Piutang Biaya Hak Pengguna Frekuensi Radio, Pelayanan Gangguan Masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun bagan struktur organisasi Balai Monitor Monitor SFR Kelas I Palembang dapat digambarkan sebagai berikut:

Struktur Organisasi Balmon Kelas I Palembang



C. PROFIL PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dalam Lampiran II Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 juga telah diatur bahwa Wilayah Kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas I Palembang adalah Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan memiliki luas wilayah 91.806,36 km², dan berbatasan dengan

- Provinsi Jambi di sebelah utara
- Provinsi Lampung di sebelah selatan
- Provinsi Bangka Belitung di sebelah timur
- Provinsi Bengkulu di sebelah barat.

Dengan mempedomani Permendagri Nomor 18 Tahun 2013 Provinsi Sumatera Selatan secara administratif dibagi menjadi 11 (sebelas) kabupaten dan 4 (empat) kota, serta 228 kecamatan. Selanjutnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abad Lematang Ilir (PALI), dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Musi Rawas Utara, maka Provinsi Sumatera Selatan secara administratif menjadi 13 (tiga belas) Kabupaten dan 4 (empat) Kota dengan jumlah desa sebanyak 2.823 desa, 363 kelurahan dan 231 kecamatan.

Tabel 1
Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan,
di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Banyuasin	Pangkalan Balai	19	11,832.99
2	Empat Lawang	Tebing Tinggi	10	2,256.44
3	Lahat	Lahat	22	5,311.74
4	Lubuk Linggau	Lubuk Linggau	8	401.50
5	Muara Enim	Muara Enim	20	7,383.90
6	Musi Banyuasin	Sekayu	14	14,266.26
7	Musi Rawas	Muara Beliti	14	6,350.00
8	Ogan Ilir	Indralaya	16	2,666.07
9	Ogan Komering Ilir	Kota Kayu Agung	18	18,359.04
10	Ogan Komering Ulu	Baturaja	12	4,797.06
11	OKU Selatan	Muaradua	19	5,493.94
12	OKU Timur	Martapura	20	3,370.00
13	Pagar Alam	Pagar Alam	5	633.66
14	Palembang	Palembang	16	400.61
15	Prabumulih	Prabumulih	6	434.50
16	Penukal Abad Lematang Ilir*	-	5	1,840.00
17	Musi Rawas Utara**	-	7	6,008.65
TOTAL.....			231	91,806.65

Provinsi Sumatera Selatan terletak antara 1° 37' 27" sampai 4° 55' 17" Lintang Selatan dan antara 102° 3' 54' dan dialiri banyak sungai besar dan kecil dengan kekayaan sumber daya yang melimpah antara lain minyak bumi, batu bara dan gas alam. Provinsi Sumatera Selatan mempunyai beberapa sungai besar. Kebanyakan sungai - sungai itu bermata air dari Bukit Barisan, kecuali Sungai Mesuji, Sungai Lalan dan Sungai Banyuasin. Sungai yang bermata air dari Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Bangka adalah Sungai Musi. Sungai Musi merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera dengan panjang sekitar 750 km menjadi tempat yang subur bagi budi daya pertanian dan perikanan, dan penghubung bagi

perdagangan antar daerah sejak jaman kerajaan Sriwijaya, sedangkan Sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Kelingi, Sungai Lakitan, Sungai Rupit dan Sungai Rawas merupakan anak Sungai Musi. Dengan letak geografis yang strategis, Sumatera Selatan menjadi salah satu pusat pertemuan dan interaksi para pedagang-pedagang asing terutama dari Arab, India dan Cina. Letak geografis ini memberikan peluang bagi Sumatera Selatan untuk cepat maju dan berkembang.

Secara topografi, wilayah Propinsi Sumatera Selatan di Pantai Timur tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Vegetasinya berupa tumbuhan palmase dan kayu rawa (bakau). Sedikit makin ke barat merupakan dataran rendah yang luas. Lebih masuk kedalam wilayahnya semakin bergunung-gunung.

Disana terdapat Bukit Barisan yang membelah Sumatera Selatan dan merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 900 – 1.200 meter dari permukaan laut. Bukit barisan terdiri atas puncak Gunung Seminung (1.964 m), Gunung Dempo (3.159 m), Gunung Patah (1.107 m) dan Gunung Bangkuk (2.125 m). Disebelah Barat Bukit Barisan merupakan Seminung (1.964 m), Gunung Dempo (3.159 m), Gunung Patah (1.107 m) dan Gunung Bangkuk (2.125 m). Disebelah Barat Bukit Barisan merupakan lereng.

D. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, tugas fungsi Balmon Kelas I Palembang disamping melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap frekuensi radio juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perangkat telekomunikasi, sehubungan dengan hal tersebut Balmon Kelas I Palembang dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi di lapangan dihadapkan dengan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Perangkat utama monitoring/ukur maupun perangkat pendukung SMFR yang ada pada Balmon Kelas I Palembang saat ini secara fungsi sudah semakin tua, sehingga dibutuhkan revitalisasi atau pengadaan perangkat telekomunikasi yang baru.
2. Sumber Daya Manusia ASN yang terdapat pada Balmon Kelas I Palembang yang memiliki kompetensi teknis dan administrasi cukup terbatas sehingga dipandang perlu penambahan personil bidang teknis dan administrasi maupun peningkatan kemampuan (*Capacity Building*).
3. Anggaran dalam rangka peningkatan kompetensi/kemampuan (*Capacity Building*) di bidang teknis dan administrasi perluditingkatkan.

4. Regulasi penggunaan spektrum yang belum komprehensif yang belum menampung perkembangan teknologi maupun bisnis telekomunikasi di Indonesia, sehingga implementasi regulasi spektrum yang belum optimal, hal ini dibutuhkan sosialisasi yang intensif yang tepat sasaran dan tepatguna.
5. Banyaknya penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis atau belum memiliki Izin Stasiun Radio(ISR).

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas I Palembang berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Kinerja Balmon Kelas I Palembang meliputi :

1. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
2. Perjanjian Kinerja berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
3. Akuntabilitas kinerja yang berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran;
4. Penutup berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

“Industri TIK merupakan industri strategis dalam mendorong tumbuhnya perekonomian nasional. Oleh karena itu, industri TIK harus terus dikembangkan seiring dengan perkembangan teknologi dan layanan bisnis sehingga dapat memberikan manfaat bagi setiap sektor kehidupan masyarakat”.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Dalam bidang infrastruktur, program pembangunan infrastruktur RPJMN 2020-2024 diarahkan pada tiga pilar, yaitu :

- 1) Pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar
- 2) Pembangunan Infrastruktur ekonomi
- 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan

Salah satu Arah Kebijakan Nasional RPJMN 2020-2024 adalah pembangunan infrastruktur ekonomi berbasis transformasi digital melalui pemerataan infrastruktur TIK, pemanfaatan infrastruktur TIK dan pengembangan enabler transformasi digital. Program-program pemerintah juga telah disusun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMN tersebut.

Isu penting bagi Kementerian Kominfo untuk mewujudkan arah RPJMN 2020-2024 adalah mendorong transformasi digital untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Seiring dengan perkembangan teknologi dan transformasi industri telekomunikasi menjadi industri digital, serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan manfaat telekomunikasi telah mendorong peningkatan penggunaan layanan telekomunikasi pada berbagai kegiatan dalam kehidupan masyarakat, baik dalam sektor industri, perbankan, perdagangan, transportasi, inovasi, pengadaan, pertanian, dan lainnya termasuk penggunaan layanan telekomunikasi untuk kegiatan emergensi, bencana dan layanan pemerintahan.

Permintaan ini menjadi potensi sektor telekomunikasi dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia baik secara langsung dalam pemenuhan layanan digital masyarakat (konsumtif) maupun secara tidak langsung dalam peningkatan produktivitas pada setiap kegiatan masyarakat tersebut. Dalam kegiatan penanganan bencana dan layanan pemerintahan, layanan telekomunikasi dapat secara efektif mendukung layanan bencana secara efisien dari sisi waktu, biaya dan proses.

Perkembangan teknologi dan layanan akses broadband dan digital seperti teknologi 5G, *Internet of Things (IoT)*, big data, *block chain*, *artificial intelligence*, penyiaran digital dan lain sebagainya termasuk kebutuhan talent digital tentunya menjadi tantangan kedepan yang harus dihadapi oleh Kementerian Kominfo termasuk didalamnya Ditjen SDPPI yang memiliki tugas dan fungsi mengoptimalkan terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informasi di industri serta mewujudkan industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan. Salah satu hal yang penting adalah terkait pengelolaan spektrum frekuensi. Dengan berkembangnya layanan digital tentunya akan berdampak pada kebutuhan spektrum frekuensi yang semakin besar sehingga perlu diantisipasi dengan melakukan perencanaan dan pengelolaan spektrum frekuensi yang baik sehingga penggunaan sumberdaya frekuensi dapat optimal.

Pengembangan *mobile broadband* merupakan salah satu aspek yang memiliki peran kunci di era *Internet of Things* ("IoT"), sehingga implementasi *mobile broadband* secara menyeluruh akan menjadi tren utama pembangunan industri telekomunikasi global kedepan. Selain dapat menggunakan pita frekuensi eksisting *mobile broadband* yang telah ditetapkan kepada penyelenggara jaringan bergerak seluler, IoT juga dapat menggunakan pita frekuensi berdasarkan Izin Kelas yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2019. Kedepannya, pita frekuensi radio berdasarkan Izin Kelas yang digunakan untuk IoT seperti untuk teknologi UWB (Ultra Wide Band) dan tambahannya untuk teknologi LPWA (Low Power Wide Area) non seluler juga akan diatur melalui revisi Peraturan Menteri tersebut.

Balmon Kelas I Palembang selaku UPT Perpanjangan tangan Ditjen SDPPI tentunya mendukung sepenuhnya rencana strategis tahun 2020 - 2024 yang telah disusun oleh Ditjen SDPPI. Selanjutnya mampu mendukung dan mensukseskan rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 - 2024 secara khusus dan sistem perencanaan pembangunan nasional dan rencana pembangunan jangka panjang 2005- 2025 secara umum.

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya setiap Kementerian/Lembaga wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini ditekankan kembali melalui Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 yang menambahkan teknis perumusan visi dan misi dalam dokumen Renstra Kementerian/ Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Secara umum visi dan misi Presiden dijabarkan sebagai berikut:

Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut, ada sejumlah misi yang diemban oleh Ditjen SDPPI yang akan dilaksanakan oleh unit kerja berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Mewujudkan tatanan spektrum radio yang efisien untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis *wireless broadband*.
2. Melakukan optimalisasi dan konsolidasi sumber daya satelit nasional, termasuk frekuensi dan slot orbit, mendorong kerjasama dengan industri satelit global dengan memperhatikan kepentingan nasional
3. Mewujudkan pelayanan frekuensi dan sertifikasi perangkat yang cepat, tepat dan benar secara profesional dan berintegritas.
4. Terkelolanya Penerimaan Negara Bukan Pajak dari izin yang diberikan kepada para pemangku kepentingan di bidang SDPPI.
5. Mewujudkan standar perangkat informatika yang mendukung kemandirian teknologi dibidang *wireless broadband*.
6. Mewujudkan kepastian hukum di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat informatika.
7. Mewujudkan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi secara terpadu.
8. Mengembangkan sistem stasiun monitoring frekuensi dan sistem monitoring perangkat yang terintegrasi secara nasional.
9. Mewujudkan peningkatan kualitas layanan pengujian dan kalibrasi perangkat informatika yang profesional, berintegritas dan diakui dunia internasional.
10. Mewujudkan dukungan teknis dan administrative yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen SDPPI

B. SASARAN PROGRAM

Sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjadi dasar bagi perumusan tujuan program Ditjen SDPPI 2020 - 2024, yakni meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan public bidang pos, telekomunikasi dan informatika (SS.5), meningkatnya pemanfaatan TIK di sector ekonomi dan bisnis (SS.6); dan terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik (SS.10).

Untuk mencapai tujuan dari program Ditjen SDPPI, Sasaran Program yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. SP.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNBPN Ditjen SDPPI
2. SP.2 Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio
3. SP.3 Pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio untuk peningkatan kualitas pelayanan publik
4. SP.4 Meningkatnya pengembangan ekosistem industri perangkat TIK
5. SP.5 Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien

Untuk mencapai tujuan dari program Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, maka kinerja yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi penertiban serta pelayanan publik spectrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi.**

Untuk mengukur kinerja pertama ini maka berikut ini adalah Indikator Kinerja kegiatan (IKK) yang akan digunakan tahun 2020, yaitu:

- 1) **Persentase (%) okupansi penggunaan frekuensi radio di Kabupaten/Kota**

Okupansi 21 pita frekuensi radio termonitor pada Kab/Kota dengan target harus 50 % dari jumlah kabupaten / kota di wilayah kerja UPT. Untuk mengukur indikator tersebut yaitu :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Jumlah Kab/Kota Termonitor}}{\text{Total Kab/Kota}}$$

- 2) **Persentase (%) pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja,**

Untuk pengukuran radio dan televisi siaran harus sesuai frekuensi, bandwidth, power, koordinat dengan ISR. Target yang ditetapkan oleh Ditjen SDPPI adalah 35 %. Untuk mengukur indikator tersebut yaitu:

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Jumlah Stasiun Siaran Terukur}}{\text{Jumlah ISR Siaran di Wilayah Kerja}}$$

3) **Persentase (%) jumlah ISR termonitor**

Target 60 % dari ISR yang tersebar di 50 % Kabupaten / kota, dan harus melakukan pemetaan terhadap sebaran ISR. Untuk mengukur indikator tersebut yaitu:

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Jumlah ISR Termonitor}}{\text{Total ISR}}$$

4) **Persentase (%) hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi**

90 % harus teridentifikasi untuk frekuensi V-UHF. Untuk mengukur indikator tersebut yaitu:

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Jumlah ISR Teridentifikasi}}{\text{Total Termonitor}}$$

5) **Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring / ukur di UPT**

Jumlah perangkat yang berfungsi adalah perangkat pendukung SMFR, sedangkan jumlah perangkat yang ada di UPT adalah total keseluruhan perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring / ukur di UPT dan 83 % perangkat pendukung tersebut berfungsi. Untuk mengukur indikator tersebut yaitu:

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Jumlah Perangkat yang berfungsi}}{\text{Jumlah Perangkat yang ada di UPT}}$$

6) **Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable,**

Laporan/ Bulan untuk setiap stasiun SMFR (tetap dan transportable) terhadap 21 pita frekuensi radio.

7) **Persentase (%) penanganan gangguan spektrum frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritim.**

Prioritas penanganan gangguan frekrad untuk alokasi keselamatan (penerbangan dan maritime). Untuk mengukur indikator tersebut yaitu:

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Jumlah Aduan Gangguan Tertangani}}{\text{Jumlah Total Aduan Gangguan}}$$

8) **Persentase (%) penertiban spektrum frekuensi radio**

Data jumlah illegal didapatkan dari hasil observasi monitoring yang berstatus illegal dan teridentifikasi dengan target sebesar 50 %. Untuk mengukur indikator tersebut yaitu:

$$TLTL = \frac{\text{Jumlah Illegal menjadi berizin} + \text{illegal menjadi off air}}{\text{Jumlah Illegal}}$$

9) **Monitoring Perangkat Telekomunikasi**

Pelaksanaan kegiatan ini minimal 1 laporan / tahun dengan hasil monitoring perangkat HKT (Handphone, Komputer dan Tablet).

10) **Persentase (%) peserta sosialisasi memahami informasi di bidang SDPPI**

Jumlah peserta sosialisasi yang telah mengetahui penggunaan frekuensi radio atau bidang SDPPI dengan target 80 %.

11) **Pelaksanaan sertifikasi operator radio berbasis CAT**

Persentase pelaksanaan Ujian Negara Radio (UNAR) berbasis Computer Assisted Test (CAT) dengan target 100 %.

12) **Penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio**

12 laporan (perbulan) terhadap penyampaian batas waktu pembayaran BHP Frekrad kepada Waba

13) **Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL**

4 laporan (triwulan) pendampingan penanganan piutang BHP Frekrad yang dilimpahkan ke KPKNL (d disesuaikan dengan anggaran masing2 UPT)

14) **Pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR**

Target yang ditetapkan oleh Ditjen SDPPI adalah 85 %. Data ISR valid hasil inspeksi yaitu jumlah data ISR valid hasil inspeksi ditambah dengan jumlah data ISR valid sebagai tindak lanjut hasil inspeksi (ISR hasil inspeksi sebelumnya tidak valid dan sudah ditindaklanjuti).

Data ISR Sampling inspeksi adalah jumlah data ISR untuk target sampling inspeksi berdasarkan data ISR masing-masing UPT dan merujuk pada formula sampling inspeksi UPT. Untuk mengukur indikator tersebut yaitu:

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Jumlah ISR Valid Hasil Inspeksi} \times 100}{\text{Data ISR Sampling Inspeksi}}$$

2. Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfrekrad yang bersih, efisien dan efektif.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang akan digunakan tahun 2020, yaitu Nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA Score) dengan target yaitu 86.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian kinerja dibuat dengan tujuan antara lain adalah untuk:

- akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

Adapun sasaran program, Indikator kinerja serta target capaian kinerja dalam tahun 2020 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1 Presentase (%) Okupansi penggunaan frekuensi radio di Kabupaten/kota	50%
		2 Prosentase (%) pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja	35%
		3 Persentase (%) jumlah ISR yang termonitor	60%
		4 Persentase (%) hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi	90%
		5 Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	83%
		6 Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable	12 Laporan
		7 Persentase (%) penanganan gangguan spektrum frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritime	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	8 Persentase (%) penertiban spektrum frekuensi radio	50%
		9 Monitoring Perangkat Telekomunikasi	1 Keg
		10 Persentase (%) peserta sosialisasi memahami informasi di bidang SDPPI	80%
		11 Pelaksanaan sertifikat operator radio berbasis CAT	100%
		12 Penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio	12 Laporan
		13 Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL	4 Laporan
		14 Pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR	85%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	86
2.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif		

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja dalam pelaksanaan program kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 10.514.972.000,- (sepuluh milyar lima ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:

- Rupiah Murni (RM) Rp. 5.609.055.000,-
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp. 4.905.917.000,-

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya untuk tahun 2020, UPT (satker di lingkungan Ditjen SDPPI) dilakukan penilaian terhadap kinerja pengelolaan anggaran masing-masing, dengan dasar penilaian ketepatan penyampaian laporan, pengelolaan UP, dan lain-lain dengan target minimal satker memperoleh nilai IKPA Score $\geq 86,00\%$.



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LKIP 2020 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran program yang ingin dicapai oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara lengkap capaian kinerja Balai Monitor SFR Kelas I Palembang pada tahun 2020 setelah dilakukan perbandingan antara target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan realisasi capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Realisasi Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2020

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Meningkatkan Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1 Presentase (%) Okupansi penggunaan frekuensi radio di Kabupaten/kota	50%	152
		2 Prosentase (%) pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja	35%	107
		3 Persentase (%) jumlah ISR yang termonitor	60%	155
		4 Persentase (%) hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi	90%	100
		5 Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	83%	117
		6 Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable	12 Laporan	100
		7 Persentase (%) penanganan gangguan spektrum frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritime	100%	100
		8 Persentase (%) penertiban spektrum frekuensi radio	50%	200
		9 Monitoring Perangkat Telekomunikasi	1 Keg	500
		10 Persentase (%) peserta sosialisasi memahami informasi di bidang SDPPI	80%	100
		11 Pelaksanaan sertifikat operartor radio berbasis CAT	100%	100
		12 Penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio	12 Laporan	100
		13 Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL	4 Laporan	100
		14 Pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR	85%	109
2.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfiredrad yang bersih, efisien dan efektif	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	86	102

Note : Persentase = Capaian dibagi Target

SASARAN 1. MENINGKATNYA LAYANAN MONITORING, PENGUKURAN, INSPEKSI DAN PENERTIBAN SERTA PELAYANAN PUBLIK SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Tercapainya sasaran Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi 17 Kab/Kota, dapat dilihat dari perbandingan antara target dengan persentase (%) capaian/ realisasi pada 2 (dua) Indikator Kinerja:

Capaian indikator dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaiannya

1. IK-1 Persentase Okupansi Penggunaan Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota

Kegiatan okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota berdasarkan ISR di Kab/Kota sebanyak 13 kegiatan yang dilaksanakan di seluruh Provinsi Sumatera Selatan sesuai program kerja Balai Monitor Kelas I Palembang dengan menggunakan alat ukur yang ada. Target pada indikator ini adalah 50% dan capaian yang telah dilaksanakan adalah 76%. Indikator ini melebihi target capaian menjadi 152%.

Indikator Kinerja		Target	Capaian
1	Presentase (%) Okupansi penggunaan frekuensi radio di Kabupaten/kota	50%	152

Terdapat 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan, 13 diantaranya telah dilakukan Kegiatan okupansi penggunaan frekuensi radio. Sedangkan 4 lainnya (Kota Lubuk Linggau, Kab. OKU Selatan, Kab. Empat Lawang, dan Kab. Musi Rawas) akan dijadikan target utama pada kegiatan okupansi penggunaan frekuensi radio di tahun berikutnya.

Tabel 4

Okupansi Penggunaan Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota Tahun 2020

No	Wilayah Kab/Kota	Keterangan	% Total Wilayah Kab/Kota Termonitor
1	Kota Palembang	Termonitor	76%
2	Kota Prabumulih	Termonitor	
3	Kota LubukLinggau	-	
4	Kota Pagar Alam	Termonitor	
5	Kab. Musi Banyuasin	Termonitor	
6	Kab. Banyuasin	Termonitor	
7	Kab. OKI	Termonitor	
8	Kab. Ogan Ilir	Termonitor	
9	Kab. Muara Enim	Termonitor	
10	Kab. OKU	Termonitor	

No	Wilayah Kab/Kota	Keterangan	% Total Wilayah Kab/Kota Termonitor
11	Kab. OKU Timur	Termonitor	76%
12	Kab. OKU Selatan	-	
13	Kab. Lahat	Termonitor	
14	Kab. Pali	Termonitor	
15	Kab. EmpatLawang	-	
16	Kab. Musi Rawas	-	
17	Kab. Musi Rawas Utara	Termonitor	

2. IK-2 Persentase Pengukuran Stasiun Radio dan Televisi Siaran di Wilayah Kerja

Capaian untuk indikator kinerja persentase pengukuran stasiun radio dan televisi siaran sebanyak 41 ISR dari 109 ISR di wilayah kerja dengan target 35%, telah terlaksana dengan capaian 37%, Indikator ini melebihi target capaian menjadi 107%.

	Indikator Kinerja	Target	Capaian
2	Prosentase (%) pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja	35%	107

Mengingat spektrum frekuensi radio merambat tanpa mengenal batas wilayah dan kompleks maka perlu diatur dan ditata dengan baik, sehingga sesuai dengan teknis dan alokasi yang ditetapkan pada peraturan perundangan yang berlaku serta tidak menimbulkan gangguan (interferensi) pada pengguna frekuensi lainnya. Melakukan pengukuran Parameter Teknis terhadap Radio dan Televisi Siaran di Kota Palembang untuk mengetahui karakteristik teknis yang digunakan apakah sesuai dengan alokasi dan teknis yang ditetapkan pada peraturan perundangan yang berlaku.

Sesuai dengan Program Kerja Tahun 2020 Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang, telah dilakukan kegiatan pengukuran frekuensi radio sebanyak 5 kali kegiatan. Dari 5 kegiatan ini telah terukur 26 stasiun radio siaran dan 15 stasiun televisi siaran, dengan data sebagaimana table berikut.

Tabel 5
Pengukuran Stasiun Radio dan Televisi Siaran
Tahun 2020

No	Wilayah Kab/Kota	Jumlah ISR Broadcasting	Radio FM		TV Siaran	
			Terukur	Tidak Terukur	Terukur	Tidak Terukur
1	Kota Palembang	41	17	1	13	10
2	Kota Prabumulih	5	0	4	0	1
3	Kota LubukLinggau	4	0	3	0	1
4	Kota Pagar Alam	4	0	4	0	0
5	Kab. Musi Banyuasin	10	5	2	2	1
6	Kab. Banyuasin	7	0	7	0	0

No	Wilayah Kab/Kota	Jumlah ISR Broadcasting	Radio FM		TV Siaran	
			Terukur	Tidak Terukur	Terukur	Tidak Terukur
7	Kab. OKI	5	0	5	0	0
8	Kab. Ogan Ilir	6	0	4	0	2
9	Kab. Muara Enim	4	0	4	0	0
10	Kab. OKU	5	0	4	0	1
11	Kab. OKU Timur	4	4	0	0	0
12	Kab. OKU Selatan	1	0	1	0	0
13	Kab. Lahat	5	0	2	0	3
14	Kab. Pali	3	0	3	0	0
15	Kab. EmpatLawang	1	0	1	0	0
16	Kab. Musi Rawas	4	0	3	0	1
17	Kab. Musi Rawas Utara	0	0	0	0	0
Total ISR		109	26	48	15	20

Tabel 6
Pengukuran Stasiun Radio Siaran Tahun 2020

No	Nama Stasiun Radio	Frekuensi	Parameter Teknis (Sesuai/Tidak Sesuai)	Bandwidth (KHz)	Wilayah Layanan
14	LPP BERSAMA KITA MAJU	100,1	Sesuai	228,85	Kab. OKU Timur
15	PT. RADIO DHIMAS BERSAUDARA (RADIO RDB)	106,8	Sesuai	248,373	Kab. OKU Timur
16	PT. RADIO SWARA MASPERO (RADIO MASPERO)	104,3	Sesuai	134,49	Kab. OKU Timur
17	LPP RADIO RRI BELITANG	97,6	Sesuai	158,351	Kab. OKU Timur
18	RADIO SANTANA MUSI PERMAI	96,7	Sesuai	212,581	Kota Palembang
19	RADIO SWARA SRIWIJAYA INDAH	94,3	Sesuai	174,62	Kota Palembang
20	RADIO CHANDRA BUANA	95,1	Sesuai	137,744	Kota Palembang
21	RADIO LESTARI CITRA BUDAYA SRIWIJAYA	103,4	Sesuai	171,367	Kota Palembang
22	Radio El Jhon FM	95,9	Tidak Sesuai	301,518	Kota Palembang
23	RADIO SUARA PESONA INDAH	99,1	Sesuai	280,911	Kota Palembang
24	RADIO LA NUGRAHA	105	Sesuai	142,082	Kota Palembang
25	RADIO HANGTUAH JAYARAYA	97,5	Sesuai	123,644	Kota Palembang
26	RADIO WARASTRA BEWARASWARA	90	Sesuai	119,306	Kota Palembang

Tabel 7

Pengukuran Stasiun Televisi Siaran Tahun 2020

No	Nama Stasiun Televisi	Kanal	Frekuensi		Jangkauan Siaran (Sesuai/ Tidak Sesuai)	Wilayah Layanan
			Video	Audio		
1	RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA	24	495,25	500,75	Sesuai	Kota Palembang
2	PT SURYA CITRA TELEVISI	32	559,25	564,75	Sesuai	Kota Palembang
3	PT Bahana Commercial (NET TV)	55	743,25	748,75	Sesuai	Kota Palembang
4	PT INSPIRASI ANDA PALEMBANG (RTV)	58	767,25	772,75	Sesuai	Kota Palembang
5	PT TRANS7 MEDAN PALEMBANG	22	479,25	484,75	Sesuai	Kota Palembang
6	PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA	38	607,25	612,75	Sesuai	Kota Palembang
7	PT GTV LIMA	36	591,25	596,75	Sesuai	Kota Palembang
8	TVRI MUBA	56	751,25	756,75	Sesuai	Kab, Musi Banyuasin
9	MAHAKARYA ANAK NEGERI (RTV MUBA)	52	719,25	724,75	Sesuai	Kab, Musi Banyuasin
10	LPP TVRI PALEMBANG	46	671,25	679,75	Sesuai	Kota Palembang
11	SUMEKS TV PALEMBANG	42	639,25	647,75	Sesuai	Kota Palembang
12	MEDIA TELEVISI NUSANTARA LIMA	34	575,25	583,75	Sesuai	Kota Palembang
13	CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI	26	511,25	519,75	Sesuai	Kota Palembang
14	LATIVI MEDIA KARYA	40	623,25	631,75	Sesuai	Kota Palembang
15	INDOSIAR	38	527,25	535,75	Sesuai	Kota Palembang

3. IK-3 Persentase Jumlah ISR yang termonitor

Indikator Persentase jumlah ISR yang termonitor memiliki target 60% sebanyak 1113 ISR dari 1198 ISR telah terlaksana dengan capaian 93%, Indikator ini melebihi target capaian menjadi 155%.

Indikator Kinerja		Target	Capaian
3	Persentase (%) jumlah ISR yang termonitor	60%	155

Tabel 8
Jumlah ISR yang Termonitor Tahun 2020

No	Wilayah Kab/Kota	Jumlah ISR	60% Jumlah ISR	Jumlah ISR Termonitor	%	60%
1	Kota Palembang	542	325	248	46%	76%
2	Kota Prabumulih	30	18	48	160%	267%
3	Kota LubukLinggau	21	13	-	-	-
4	Kota Pagar Alam	9	5	80	889%	1481%
5	Kab. Musi Banyuasin	267	160	81	30%	51%
6	Kab. Banyuasin	164	98	73	45%	74%
7	Kab. OKI	147	88	73	50%	83%
8	Kab. Ogan Ilir	46	28	89	193%	322%
9	Kab. Muara Enim	342	205	102	30%	50%
10	Kab. OKU	106	64	66	62%	104%
11	Kab. OKU Timur	24	14	64	267%	444%
12	Kab. OKU Selatan	11	7	-	-	-
13	Kab. Lahat	159	95	62	39%	65%
14	Kab. Pali	22	13	63	286%	477%
15	Kab. EmpatLawang	7	4	-	-	-
16	Kab. Musi Rawas	87	60	-	-	-
17	Kab. Musi Rawas Utara	13	-	64		
Total		1997	1.198	1113	39%	96%

4. IK-4 Persentase Hasil Monitoring Frekuensi yang teridentifikasi

Indikator Persentase jumlah ISR yang termonitor memiliki target 90% sebanyak 849 ISR dari 998 ISR telah terlaksana dengan capaian 90%, Capaian Indikator ini sudah optimal 100%.

Indikator Kinerja		Target	Capaian
4	Persentase (%) hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi	90%	100

Tabel 9
Hasil Monitoring Frekuensi yang Teridentifikasi Tahun 2020

No	Wilayah Kab/Kota	Hasil Monitor		Total
		Teridentifikasi	Tidak Teridentifikasi	
1	Kota Palembang	229	10	239
2	Kota Prabumulih	54	9	63
3	Kota LubukLinggau	-	-	-
4	Kota Pagar Alam	61	1	62
5	Kab. Musi Banyuasin	60	6	66

No	Wilayah Kab/Kota	Hasil Monitor		Total
		Teridentifikasi	Tidak Teridentifikasi	
6	Kab. Banyuasin	66	9	75
7	Kab. OKI	54	9	63
8	Kab. Ogan Ilir	72	8	80
9	Kab. Muara Enim	51	5	56
10	Kab. OKU	46	10	56
11	Kab. OKU Timur	54	1	55
12	Kab. OKU Selatan	-	-	-
13	Kab. Lahat	50	1	51
14	Kab. Pali	47	7	54
15	Kab. EmpatLawang	-	-	-
16	Kab. Musi Rawas	-	-	-
17	Kab. Musi Rawas Utara	39	15	54
Jumlah		857	88	945

Secara keseluruhan dari hasil kegiatan observasi monitoring frekuensi radio di 13 Kabupaten/Kota, 857 ISR telah teridentifikasi dari total 945 ISR.

5. IK-5 Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT
- Untuk menjaga kondisi peralatan dan perangkat pendukung kegiatan monitoring/pengukuran dilakukan pemeliharaan baik yang dilakukan secara rutin maupun terhadap perangkat yang mengalami kerusakan. Dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 kondisi peralatan/perangkat untuk mendukung kegiatan monitoring/pengukuran, 10 (sepuluh) alat ukur yang ada berada dalam kondisi baik (100%), dari target yang ditetapkan sebesar 85%.

Indikator Kinerja		Target	Capaian
5	Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	83%	117

Tabel 10
Daftar Alat Monitoring/Ukur dan Kondisi

No	Merk/Type	Range Frekuensi	Jumlah	Keterangan (Baik/Rusak Ringan/Rusak Berat)
1	Agilent / N9340B	100 kHz – 3 GHz	1	Baik
2	Agilent / N 93445	1 MHz – 20 MHz	1	Baik
3	Keysight / 9918A	26 GHz	1	Baik
4	Keysight / N 9961 A	444 GHz	1	Baik
5	Keysight / N9938 A	26 GHz	1	Baik
6	Portable Receiver / PR 100	20 MHz – 7,56 GHz	2	Baik

No	Merk/Type	Range Frekuensi	Jumlah	Keterangan (Baik/Rusak Ringan/Rusak Berat)
7	TV Analyzer / Rover HD Tab 9	4 Mhz – 2250 MHz	1	Baik
8	Agilent / N 9010 P	9 kHz – 26,5 GHz	1	Baik
9	Anritsu / MS 2667 C	9 kHz – 26,5 GHz	1	Baik
10	Anritsu / MS 2667 E	9kHz – 3 GHz	1	Baik

Kebijakan pemerintah yang membangun infrastruktur di segala bidang termasuk di sektor telekomunikasi, khususnya dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis di daerah, Ditjen SDPPI telah mengembangkan Sistem Monitoring melalui pembangunan stasiun monitoring/Slave dan perangkat transportabel di beberapa wilayah provinsi, sehingga data pengguna dilapangan bisa dimonitor melalui stasiun tetap Pengendali (yang berada di kantor), selanjutnya untuk pengguna frekuensi yang berada di kota Palembang dan sekitarnya akan dipantau melalui titik/lokasi slave yang berada di 3 titik wilayah terluar Kota Palembang yakni:

1. Meritay, Jakabaring
2. Pulokerto, Gandus Palembang
3. Kenten, Palembang

Tabel 11
Jadwal Pemeliharaan Perangkat Pendukung SMFR dan
Alat Monitoring/Ukur Tahun 2020

Periode Pemeliharaan	Hasil Pemeriksaan Perangkat Transportable					
	Stasiun Slave Palembang (Gandus)		Stasiun Slave Jakabaring		Stasiun/Slave Kenten Laut	
	Perangkat Utama	Perangkat Pendukung	Perangkat Utama	Perangkat Pendukung	Perangkat Utama	Perangkat Pendukung
30 September 2019 s.d 04 Oktober 2020 dalam rangka verifikasi fungsi perangkat	Baik	Baik	Baik	Baik	Rusak	Baik

Seluruh fasilitas dan prasarana tersebut diatas, Stasiun Slave Kenten terdapat kerusakan pada perangkat utamanya dan menunggu perbaikan dari Dirjen SDPPI, sedangkan Stasiun Slave Jakabaring dan Gandus berfungsi dengan baik dalam menunjang kegiatan operasional guna mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Balai Monitor SFR Kelas I Palembang dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan adanya Penambahan sarana dan prasarana tersebut diharapkan akan lebih mengoptimalkan kegiatan observasi dan monitoring frekuensi radio di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Sedangkan untuk wilayah luar kota Palembang, telah ditempatkan perangkat transportable di 3 titik lokasi kota/kab yang dianggap mempunyai potensi pengguna frekuensi cukup tinggi yakni:

1. Kota Lubuklinggau
2. Kota Prabumulih
3. Kota pangkalan balai (Kab. Banyuasin)

Kondisi perangkat transportabel yang ada di Kota Prabumulih dan Kota Pangkalan Balai tidak berfungsi dengan baik, karena keterbatasan anggaran pada tahun 2020 belum bisa dilakukan pemeliharaan dengan sebagaimana mestinya, pemeliharaan perangkat tersebut masih dilakukan secara terpusat oleh Ditjen SDPPI melalui pihak ketiga yang telah ditunjuk.

6. IK-6 Jumlah Laporan Monitoring Frekuensi Radio dari setiap Stasiun SMFR Tetap dan Transportable

Indikator ini mempunyai target kinerja untuk monitoring frekuensi radio dari setiap perangkat Sistem Monitoring Spektrum Frekuensi (SMFR) Tetap dan Transportable sebanyak 12 laporan dan yang telah dilaporkan sebanyak 12 laporan, sehingga indikator ini mencapai target 100%.

Indikator Kinerja		Target	Capaian
6	Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable	12 Laporan	100

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang sebagai bagian dari manajemen spektrum frekuensi radio yang mempunyai fungsi pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio, secara periodic melakukan pemantauan penggunaan frekuensi radio dan perangkat pos dan informatika di wilayah yang menjadi kewenangan fungsi dan tugas Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang. Monitoring menggunakan perangkat Sistem Monitoring Spektrum Frekuensi (SMFR) Tetap dan Transportable dilakukan secara rutin. Hasil dari kegiatan ini dilaporkan setiap bulan.

Tabel 12
Jumlah Laporan Monitoring Frekuensi Radio dari Setiap Stasiun SMFR Tetap dan Transportable

No	Bulan	Stasiun SMFR yang Digunakan	Laporan
1	Januari	Site Kenten (Stasiun tetap)	1 Laporan
2	Februari	Site Kenten (Stasiun tetap)	1 Laporan
3	Maret	Site Kenten (Stasiun tetap)	1 Laporan
4	April	Site Kenten (Stasiun tetap) Site LubukLinggau (Stasiun transportable)	1 Laporan
5	Mei	Site Rambutan (Stasiun tetap)	1 Laporan
6	Juni	Site Kenten (Stasiun tetap) Site LubukLinggau (Stasiun transportable)	1 Laporan
7	Juli	Site Kenten (Stasiun tetap) Site LubukLinggau (Stasiun transportable)	1 Laporan
8	Agustus	Site LubukLinggau (Stasiun transportable) Site Rambutan (Stasiun tetap) Site Gandus (Stasiun tetap)	1 Laporan
9	September	Site Rambutan (Stasiun tetap)	1 Laporan
10	Oktober	Site Rambutan (Stasiun tetap)	1 Laporan
11	November	Site Rambutan (Stasiun tetap) Site Gandus (Stasiun tetap)	1 Laporan
12	Desember	Site Gandus (Stasiun tetap)	1 Laporan
Jumlah			12 Laporan

7. IK-7 Persentase penanganan gangguan spektrum frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritim

Indikator ini terdapat 2 (dua) aduan gangguan spektrum frekuensi radio penerbangan yang masuk ke Balai Monitor Kelas I Palembang, dari aduan tersebut telah clear. Sehingga indikator ini telah mencapai target sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja	Target	Capaian
7 Persentase (%) penanganan gangguan spektrum frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritime	100%	100

Tabel 13
Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keselamatan Penerbangan Maritim Tahun 2020

No	Kab/Kota	Nama Perusahaan/Pemilik ISR yang Mengalami Gangguan	Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1	Kota Pagaram	Gangguan Frekuensi Penerbangan 122.2	09-13 Juni 2020	Clear
2	Kota Pagaram	Gangguan Frekuensi Penerbangan 122.2	30 Sept-03 Okt 2020	Clear

Dalam sistem komunikasi yang berbasis pada penggunaan frekuensi radio, dimana banyak sekali penyedia jasa layanan yang beroperasi akan memberikan dampak diantaranya efek berupa interferensi yang tinggi yang selanjutnya menyebabkan terjadinya gangguan diantara sesama pengguna frekuensi baik yang legal maupun illegal. Gangguan frekuensi yang tidak ditangani dengan baik dan diselesaikan akan menyebabkan ketidaknyamanan berkomunikasi, dan dalam kasus-kasus tertentu dapat membahayakan seperti terjadinya gangguan pada frekuensi penerbangan.

Pada periode tahun 2020, Balai Monitor SFR Kelas I Palembang menerima 10 laporan aduan adanya gangguan frekuensi, 2 diantaranya merupakan gangguan spektrum frekuensi radio penerbangan. Dari keseluruhan laporan yang masuk gangguan berhasil diselesaikan atau dinyatakan clear.

8. IK-8 Persentase penertiban spektrum frekuensi radio

Indikator penertiban spektrum frekuensi radio terkait perizinan sebanyak 4 kali kegiatan yang salah satunya adalah Penertiban Nasional yang diadakan serentak di seluruh Indonesia. Dengan target 50% dan terlaksana sebesar 100%, Indikator ini melebihi target capaian menjadi 200%.

Indikator Kinerja		Target	Capaian
8	Persentase (%) penertiban spektrum frekuensi radio	50%	200

Tabel 14
Kegiatan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2020

No	Kab/Kota	Jumlah Perangkat	Sertifikasi	
			Sesuai	Tidak Berlaku
1	Musi Banyuasin	19	19	-
2	Ogan Komering Ulu	20	20	-
3	Palembang	29	29	-
4	Banyuasin	15	14	1

9. IK-9 Monitoring Perangkat Telekomunikasi

Indikator Kinerja ini adalah kegiatan Monitoring standar perangkat pos dan informatika di wilayah UPT Palembang dengan target 1 kegiatan dan capaian pada kinerja ini melebihi target sehingga pada indikator monitoring perangkat telekomunikasi melampaui sebanyak 5 kegiatan sehingga capaian menjadi 500%.

Indikator Kinerja		Target	Capaian
9	Monitoring Perangkat Telekomunikasi	1 Keg	500

Tabel 15
Kegiatan Monitoring Perangkat Telekomunikasi
Tahun 2020

No	Kab/Kota	Jumlah Perangkat	Sertifikasi	
			Sesuai	Tidak Berlaku
1	Musi Banyuasin	19	19	-
2	Ogan Komering Ulu	20	20	-
3	Palembang	29	29	-
4	Banyuasin	15	14	1
5	Banyuasin	7	4	3

Alat telekomunikasi adalah alat-alat perlengkapan yang dimanfaatkan dalam bertelekomunikasi, sedangkan yang dimaksud dengan perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan terjadinya proses telekomunikasi.

Untuk menjamin peralatan ataupun perangkat telekomunikasi aman dipergunakan, Ditjen SDPPI telah menetapkan standard peralatan maupun perangkat telekomunikasi sebelum beredar di pasar dan dipergunakan oleh masyarakat sehingga terhindar dari hal-hal yang merugikan. Perangkat telekomunikasi tersebut harus melewati tahap pengujian sebelum dinyatakan memenuhi persyaratan, dan akan diberikan sertifikasi apabila ternyata sudah Lulus Uji.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Balai Monitor SFR Kelas I Palembang telah melakukan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi yang beredar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dan untuk tahun 2020 telah dilaksanakan 5 kegiatan, yang berarti sudah melebihi target yang telah ditetapkan yakni 1 kegiatan.

10. IK-10 Persentase peserta sosialisasi memahami informasi di bidang SDPPI

Indikator ini untuk mewujudkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib sesuai aturan yang berlaku. Dengan target 80% dan paham terhadap informasi dibidang SDPPI 80% sehingga indikator tercapai 100%

Indikator Kinerja		Target	Capaian
10	Persentase (%) peserta sosialisasi memahami informasi di bidang SDPPI	80%	100

Dalam meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya para pengguna frekuensi radio terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam penggunaan frekuensi radio agar sesuai dengan peruntukannya. Spektrum Frekuensi Radio yang merupakan sumber daya alam yang sangat terbatas dan penting bagi negara agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. Balai monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang telah melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan di bidang telekomunikasi terkait dengan Perizinan Frekuensi Radio Maritim kepada Komunitas Nelayan di Wilayah Sungsang Kab. Banyuasin pada tanggal 01 Desember 2020 di Desa Sungsang Kab. Banyuasin yang diikuti oleh Komunitas Nelayan yang ada di Desa Sungsang. Kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan memberikan penjelasan tentang alokasi-alokasi kanal-kanal frekuensi radio yang boleh dan bisa digunakan oleh Nelayan, utamanya dalam kegiatan mereka melakukan penangkapan ikan dilaut lepas. Dijelaskan bahwa jika penggunaan frekuensi yang tidak sesuai dengan peruntukan dan perangkat yang digunakan tidak terstandarisasi dapat berpotensi menimbulkan gangguan kepada pengguna frekuensi radio yang lain, terutama gangguan terhadap frekuensi penerbangan. Untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta sosialisasi dengan materi yang telah diberikan maka diberikan tes di akhir sosialisasi dan didapatkan nilai rata-rata sebesar 80,24%

11. IK-11 Persentase Pelaksanaan sertifikasi operator radio berbasis CAT

Pelaksanaan sertifikasi operator radio berbasis CAT merupakan kegiatan pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) yang dilaksanakan di wilayah kerja UPT Palembang Pada tahun 2020, pelaksanaan kegiatan UNAR Reguler setiap bulan sebanyak 12 kali kegiatan dan UNAR Non Reguler sebanyak 1 kali kegiatan.

Indikator Kinerja		Target	Capaian
11	Pelaksanaan sertifikat operartor radio berbasis CAT	100%	100

Dengan mengacu pada target Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020, untuk Ujian

Negara Amatir Radio ditetapkan yakni 100,00%, sesuai dengan program kerja tahun anggaran 2020 dengan target 1 kegiatan, dan dilaksanakan di Kab. Ogan Komering Ulu tanggal 26 Juli 2020.

Keinginan Masyarakat/calon Amatir Radio di wilayah Provinsi Sumatera Selatan masih cukup tinggi untuk mengikuti kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) secara reguler, sehingga kegiatan UNAR secara reguler direncanakan 1 kegiatan setiap bulannya.

Tabel 16
Hasil Pelaksanaan Sertifikasi Operator Radio Berbasis CAT
Tahun 2020

No	Tempat	Tingkat	Jumlah Peserta Ujian	Jumlah Peserta yang Lulus	Keterangan
1.	Kab. Ogan Komering Ulu	Siaga	75	63	Non Reguler
		Penggalang	32	23	CAT
		Penegak	5	2	
2.	Kota Palembang	Siaga	5	5	Reguler
		Penggalang	2	2	CAT
		Penegak	0	0	
3.	Kota Palembang	Siaga	11	9	Reguler
		Penggalang	3	1	CAT
		Penegak	0	0	
4.	Kota Palembang	Siaga	12	11	Reguler
		Penggalang	3	1	CAT
		Penegak	0	0	
5.	Kota Palembang	Siaga	3	3	Reguler
		Penggalang	2	2	CAT
		Penegak	0	0	
6.	Kota Palembang	Siaga	14	10	Reguler
		Penggalang	0	0	CAT
		Penegak	0	0	
7.	Kota Palembang	Siaga	3	3	Reguler
		Penggalang	1	1	CAT
		Penegak	0	0	
8.	Kota Palembang	Siaga	20	19	Reguler
		Penggalang	1	1	CAT
		Penegak	0	0	

No	Tempat	Tingkat	Jumlah Peserta Ujian	Jumlah Peserta yang Lulus	Keterangan
8.	Kota Palembang	Siaga	20	19	Reguler
		Penggalang	1	1	CAT
		Penegak	0	0	
9.	Kota Palembang	Siaga	9	9	Reguler
		Penggalang	2	2	CAT
		Penegak	0	0	
10.	Kota Palembang	Siaga	13	12	Reguler
		Penggalang	1	0	CAT
		Penegak	0	0	
11.	Kota Palembang	Siaga	13	10	Reguler
		Penggalang	0	0	CAT
		Penegak	0	0	
12.	Kota Palembang	Siaga	9	8	Reguler
		Penggalang	5	5	CAT
		Penegak	0	0	
13.	Kota Palembang	Siaga	11	11	Reguler
		Penggalang	0	0	CAT
		Penegak	0	0	

12. IK-12 Penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio

Indikator ini melaksanakan penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Pada indikator ini telah dilaksanakan sesuai dengan target, capaiannya yaitu 12 laporan.

Indikator Kinerja		Target	Capaian
12	Penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio	12 Laporan	100

Target yang ditentukan untuk pendistribusian SPP, ST dan ISR sebesar 100,00%, dan sampai dengan akhir tahun anggaran target tersebut dapat dicapai dengan capaian realisasi sebesar 100,00%. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi penyampaian SPP maupun ST sudah dapat dilakukan dengan lebih cepat secara online. Kecuali untuk daerah yang masih terbatas akses internetnya sehingga dokumen tersebut masih harus disampaikan secara manual lewat pos/jasa titipan.

Tabel 17

Data Pendistribusian SPP dan ST Tahun 2020

Uraian	Bulan												Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
SPP	69	36	63	35	23	37	51	41	59	62	49	46	571
ST	13	20	15	16	19	10	7	9	14	12	9	7	151
Total	82	56	78	51	42	47	58	50	73	74	58	53	722

Pada periode tahun 2020 jumlah nilai BHP yang sudah terbayar dan masih terhutang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 18
Nilai BHP Frekuensi Radio Terbayar dan Masih Terhutang
Tahun 2020

No	Jenis Service	Jumlah SPP	Jumlah Waba	Nilai BHP (Rp)	Terbayar (Rp)	BlmTerbayar (Rp)
1	Broadcast	90	88	1.337.162.587	1.337.162.587	0
2	Land Mobile Private	464	213	748.534.116	748.534.116	0
Jumlah		554	301	2.085.696.703	2.085.696.703	0

13. IK-13 Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL

Untuk optimalisasi pengurusan Piutang Negara, maka diperlukan koordinasi antara KPKNL Palembang dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal ini UPT Palembang terhadap pihak yang berpiutang. Pada tahun 2020, kegiatan penanganan piutang telah dilaksanakan sebanyak 4 laporan dari target 4 laporan.

Indikator Kinerja		Target	Capaian
13	Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL	4 Laporan	100

Untuk tahun 2020 telah dilaksanakan 4 kali kegiatan pendampingan Pengurusan Penyelesaian Piutang PNB BHP Frekuensi Radio sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan menindaklanjuti permintaan dari KPKNL dengan capaian 100,00%. Total jumlah Wajib Bayar sebanyak 11 (sebelas) Client/perusahaan. Kegiatan ini diharapkan dapat meminimalisir jumlah Piutang PNB yang tidak tertagih, sebagai akibat kelalaian Pemegang ISR untuk membayar BHP Frekuensi tepat waktu. Hasil pelimpahan sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini:

Tabel 19

Pelimpahan Piutang BHP Tahun 2020

No	Kegiatan	Pemegang ISR	Nilai Tunggakan	Hasil	Keterangan
1.	Rekonsiliasi berkas Piutang BHP yang diserahkan ke KPKNL Palembang	Bakti Daya Perkasa, PT.	334.374	Penerimaan	
		Multi Daya Palembang, PT.	219.447	SPPNL	
		CV. Pempel 1707	219.447	Pengembalian	
		Azsa Sukses Sejahtera Abadi (Azza Hotel), PT.	219.447	SPPNL	
		Bukit Pembangkit Innovative, PT.	329.178	Pengembalian	
		Wijaya Kusuma Contractor Cab Palembang, PT.	731.487	Pengembalian	
		Cerah Televisi Indonesia, PT.	41.150.037	PJP	
		Sibolga Medan Bersama, PT.	41.150.037	PJP	
		Buana Eltra, PT.	938.551	PJP	
2.	Rekonsiliasi berkas Piutang BHP yang diserahkan ke KPKNL Lahat	Aman Toe bilah Putra, PT.	1.511.674	SPPNL	
		RSUD DR. H. Mohamad Rabain Kabupaten Muara Enim	1.458.368	SPPNL	

14. IK-14 Pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR

Indikator ini adalah pelaksanaam Inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR telah dilaksanakan 16 kali dengan target sampling sebanyak 2702 ISR, terlaksana sebanyak 2061 ISR dengan realisasi sebesar 93% dari 85% target yang ditetapkan, sehingga capaian indakator ini sebesar 109%.

Indikator Kinerja		Target	Capaian
14	Pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR	85%	109

Tabel 20
Inspeksi Stasiun Radio Terkait Validasi Data ISR Tahun 2020

NO	KOTA/KAB	PENGGUNA	STATUS					
			SESUAI	TIDAK SESUAI	TIDAK TERDAFTAR	OFF	GUDANG /REUSE	Grand Total
1	KAB. MUARA ENIM	INDOSAT	20	0	0	0	12	32
		XL AXIATA	32	3	0	0	0	35
		TELEKOMUNIKASI INDONESIA	36	0	0	0	0	36
		TELEKOMUNIKASI SELULAR	12	0	0	0	29	41
		SMARTFREN	27	5	0	1	1	34
		H3I	53	0	0	3	0	56
		SUBTOTAL	180	8	0	4	42	234

NO	KOTA/KAB	PENGGUNA	STATUS					
			SESUAI	TIDAK SESUAI	TIDAK TERDAFTAR	OFF	GUDANG /REUSE	Grand Total
2	KAB. MUSI BANYUASIN	INDOSAT	55	0	0	0	0	55
		XL AXIATA	39	15	2	0	4	60
		TELEKOMUNIKASI SELULAR	34	1	3	0	8	46
		SMARTFREN	7	1	0	0	0	8
		H3I	28	3	2	0	14	47
		SUBTOTAL	163	20	7	0	26	216
3	KAB. OGAN KOMERING ULU	INDOSAT	64	0	0	0	14	78
		XL AXIATA	28	0	4	0	22	54
		TELEKOMUNIKASI SELULAR	92	0	0	0	22	114
		SUBTOTAL	184	0	4	0	58	246
4	KOTA PALEMBANG	SMARTFREN	26	0	0	0	5	31
		STI	11	0	0	0	5	16
		H3I	92	2	1	0	0	95
		SUBTOTAL	129	2	1	0	10	142
5	KAB. OKU TIMUR	INDOSAT	185	5	1	0	95	286
		SUBTOTAL	185	5	1	0	95	286
6	KOTA PAGAR ALAM	TELEKOMUNIKASI INDONESIA	37	5	6	0	3	51
		TELEKOMUNIKASI SELULAR	14	3	1	0	3	21
		SUBTOTAL	51	8	7	0	6	72
7	KAB. OGAN ILIR	TELEKOMUNIKASI INDONESIA	42	0	0	0	1	43
		TELEKOMUNIKASI SELULAR	46	0	0	0	6	52
		SUBTOTAL	88	0	0	0	7	95

SASARAN 2 TERWUJUDNYA TATA KELOLA UPT MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG BERSIH, EFISIEN, DAN EFEKTIF

Sebagai upaya peningkatan pada pelayanan publik bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang melaksanakan kegiatan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan serta penilaian yang dirangkum dalam penjelasan sebagai berikut.

IK-1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	86	102

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja

K/L. Berikut ini adalah capaian IKPA Score Balai Monitor SFR Kelas I Palembang pada tahun 2020 dengan nilai 88,39% dan masih diatas target yang telah ditetapkan yakni 86% dapat dilihat dalam tabel IKPA sesuai dengan Monitoring OM SPAN.

Tabel 21
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020

SATKER		613455 (Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang)			
KETERANGAN PENILAIAN		NILAI	BOBOT	NILAI AKHIR	NILAI ASPEK
Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan	Revisi DIPA	100	5	5	94,9
	Deviasi Halaman III DIPA	84,69	5	4,23	
	Pagu Minus	100	5	5	
Kepatuhan Terhadap Regulasi	Data Kontrak	100	15	15	95
	Pengelolaan UP dan TUP	88	8	7,04	
	LPJ Bendahara	92	5	4,6	
	Dispensasi SPM	100	5	5	
Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan	Penyerapan Anggaran	100	15	15	81,25
	Penyelesaian Tagihan	80	12	9,6	
	KonfCapaian output	45	10	4,5	
	Retur SP2D	100	5	5	
Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan	Renkas	0	0	0	80
	Kesalahan SPM	80	5	4	
NILAI TOTAL					83,97
KONVERSI BOBOT					95%
NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)					88,39

B. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi serta pencapaian sasaran kinerja tahun 2020, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang juga melaksanakan layanan administrasi yang terdiri dari :

- 1) Perencanaan dan program kerja dan anggaran dan pelaporan kinerja sesuai aturan yang berlaku

No.	Kode Output	Uraian	Volume	Pagu
1	12	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika, terdiri dari :	47 Kegiatan	586.999.000
		1. Observasi dan Monitoring bergerak frekuensi radio di 17 Kabupaten/Kota Palembang	13 Kegiatan	198.721.000
		2. Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota Palembang	3 Kegiatan	86.547.000
		3. Validasi Data Frekuensi Radio di 17	13	198.721.000

No.	Kode Output	Uraian	Volume	Pagu
		Kabupaten/Kota Palembang	Kegiatan	
		4. Pengukuran Parameter Teknis Frekuensi Radio di 17 Kabupaten/Kota Palembang	5 Kegiatan	55.529.000
		6. Ujian Negara amatir Radio	13 Kegiatan	47.481.000
2	49	Penyelesaian Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Balai Monitor, terdiri dari :	6 Kegiatan	61.066.000
		Penganganan Gangguan Frekuensi Radio di Kabupate/Kota	6 Kegiatan	61.066.000
3	78	Dukungan Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di UPT Ditjen SDPPI, terdiri dari:	1 Layanan	2.813.100.000
		1. Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML)	12 Bulan	804.000.000
		2. Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi	1 Laporan	1.658.600.000
		3. Peningkatan Sarana dan Prasana Perkantoran	1 Laporan	179.440.000
		4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan	1 Laporan	171.060.000
4.	951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	231.338.000
		1. Kendaraan Bermotor Roda Dua	1 Unit	31.688.000
		2. Alat Studio dan Komunikasi	1 Unit	199.650.000
5.	994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	6.822.469.000
		1. Gaji dan Tunjangan	14 Bulan	4.437.717.000
		2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	2.384.752.000
		Jumlah		10.514.972.000

2) Jumlah Dokumen Keuangan UPT

Tahun Anggaran 2020, untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan/anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang melakukan 6 kali revisi DIPA dengan pagu terakhir Rp 10.514.972.000,- atau terjadi penambahan sebesar Rp. 677.013.000,-penambahan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai yang mengalami pagu minus dan belanja modal dropping dari kantor pusat.

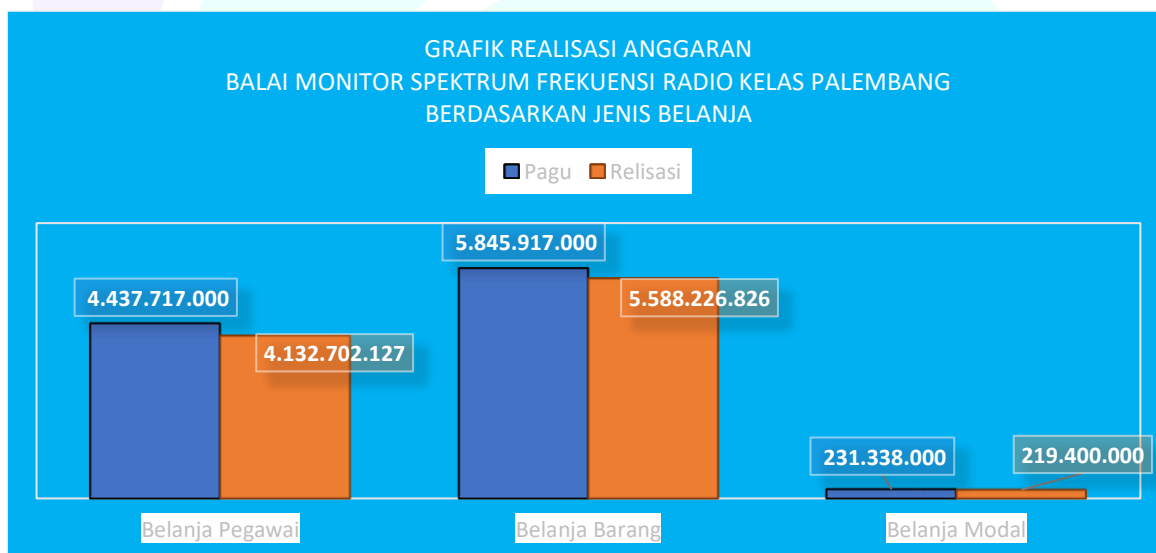
Kinerja pelaksanaan anggaran maupun kegiatan juga dilaporkan secara rutin melalui aplikasi yang sudah berbasis online yakni SMART, Monev_Bappenas, dan pada akhir tahun setiap satker sudah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja untuk memberikan gambaran kinerja pada periode tahun sebelumnya.

Realisasi pelaksanaan anggaran / keuangan selama tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 9.940.328.953,- atau 94,54%. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2019 sebesar 96,70% terdapat kemunduran realisasi anggaran sebesar 2,16%. Adapun Rincian Realisasi per Belanja dan per Output dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

a. Realisasi Anggaran perjenis Belanja Tahun 2020

Tabel 22
Realisasi Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas I Palembang Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2020

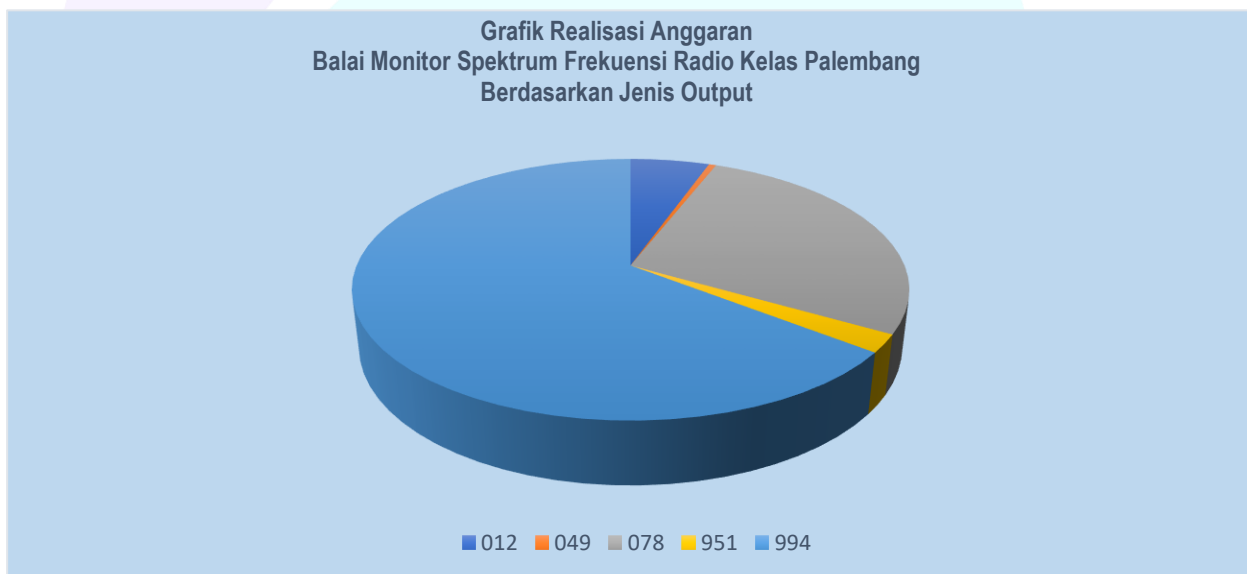
Akun	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
51	Belanja Pegawai	4.437.717.000	4.132.702.127	93,13%
52	Belanja Barang	5.845.917.000	5.588.226.826	95,59%
53	Belanja Modal	231.338.000	219.400.000	94,84%
	Total	10.514.972.000	9.940.328.953	94,54%



b. Realisasi Anggaran perjenis Output Tahun 2020

Tabel 23
Realisasi Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas I Palembang berdasarkan Jenis Output Tahun 2020

Kode	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
012	Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan Informatika Balmon Kelas I Palembang	586.999.000	543.930.361	92,66%
049	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas I Palembang	61.066.000	49.743.259	81,46%
078	Dukungan layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio UPT Ditjen SDPPI	2.813.100.000	2.713.346.175	96,45%
951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	231.338.000	219.400.000	94,84%
994	Layanan Perkantoran	6.822.469.000	6.413.909.158	94,01%
	Total	10.514.972.000	9.940.328.953	94,54%



3). Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN sesuai aturan yang berlaku

Untuk menunjang aktivitas operasional sehari-hari perkantoran, dilakukan pengadaan barang/jasa berupa Belanja Modal tahun anggaran 2020 hasil pengadaan barang/jasa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24
Daftar Barang Milik Negara Tahun 2020

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	Unit	5	5	
2	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya	Unit	2	2	
3	Sepeda Motor	Unit	4	2	2
4	Mobil Unit Monitoring Frekuensi	Unit	1	1	
5	Battery Charge	Buah	6	6	
6	Steam Cleaner	Buah	1	1	
7	Tool Kit Set	Buah	2	2	
8	Tang Potong	Buah	2	2	
9	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	Buah	2	2	
10	Spektrum Analyzer	Buah	6	6	
11	Megger	Buah	2	2	
12	Swr Meter	Buah	4	4	
13	Frequency Counter	Buah	2	2	
14	Frequency Inverter	Buah	7	7	
15	Antenna Selector	Buah	1	1	
16	Log Perodic Antenna	Buah	2	2	
17	TV Analyzer	Unit	1	1	
18	Scanner (Universal Tester)	Buah	3	3	
19	Fieldstrength Meter	Buah	1	1	
20	Lemari Penyimpan	Buah	1	1	
21	Lemari Besi/Metal	Buah	13	13	
22	Lemari Kayu	Buah	9	9	
23	Rak Besi	Buah	1	1	
24	Rak Kayu	Buah	7	7	
25	Filling Cabinet Besi	Buah	34	34	
26	Brandkas	Buah	3	3	
27	Tabung Pemadam Api	Buah	4	4	
28	Camera Control Television System (CCTV)	Buah	9	9	
29	Copy Board/Elektric White Board	Buah	1	1	
30	Mesin Absensi	Buah	1	1	
31	Overhead Projector	Buah	1	1	
32	Acces Control System	Buah	4	4	
33	Panic Button System, Alam Indicator	Buah	4	4	
34	Meja Kerja Kayu	Buah	41	41	
35	Kursi Besi/Metal	Buah	161	161	
36	Sice	Buah	3	3	
37	Meja Rapat	Buah	9	9	
38	Meja Resepsionis	Buah	1	1	
39	Partisi	Buah	4	4	
40	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	Buah	1	1	

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi	
				Baik	Rusak
41	Mesin Pemotong Rumput	Buah	1	1	
42	Lemari Es	Buah	2	2	
43	A.C. Split	Buah	25	25	
44	Kompor Gas	Buah	2	2	
45	Rak Piring Alumunium	Buah	2	2	
46	Televisi	Buah	5	5	
47	Laodspeaker	Buah	2	2	
48	Sound System	Buah	3	3	
49	Wireless	Buah	3	3	
50	Stabilisator	Buah	6	6	
51	Tangga Alumunium	Buah	1	1	
52	Dispenser	Buah	1	1	
53	Handy Cam	Buah	1	1	
54	Gordyn/Kray	Buah	1	1	
55	DVD Player	Buah	1	1	
56	Kabel	Buah	1	1	
57	Lampu	Buah	15	15	
58	Tangki Ait	Buah	2	2	
59	Microphone/Wireless Mic	Buah	1	1	
60	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	13	13	
61	Power Amplifier	Buah	1	1	
62	Receiver HF/LF	Buah	1	1	
63	Microphone Cable	Buah	1	1	
64	Cable	Buah	1	1	
65	Voice Recorder	Buah	1	1	
66	Analog/Digital receiver	Buah	2	2	
67	Low Noise Amplifier EHF	Buah	1	1	
68	Power Supply (Peralatan Studio Vedeo dan Film)	Buah	2	2	
69	Rak Peralatan	Buah	1	1	
70	Head Set	Buah	1	1	
71	Camera Digital	Buah	2	2	
72	Video Conference	Buah	1	1	
73	Connectors	Buah	2	2	
74	VTR Recorderr	Buah	4	4	
75	RF Cable	Buah	4	4	
76	Altimeter	Buah	1	1	
77	Teropong	Buah	2	2	
78	GPS Receiver	Buah	4	4	
79	Telephone (PABX)	Buah	1	1	
80	Handy Talky (HT)	Buah	10	10	
81	Facsimile	Buah	1	1	
82	Unit Tranceiver HF Portable	Buah	2	2	
83	Unit Tranceiver VHF Portable	Buah	1	1	

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi	
				Baik	Rusak
84	Unit Tranceiver UHF Portable	Buah	1	1	
85	Radio Link	Buah	6	6	
86	Repeater RX/TX	Buah	2	2	
87	Ups 15 Kva for Hub Station	Buah	1	1	
88	Unit Pemancar VHF/FM Stationary	Buah	1	-	1
89	Unit Pemancar UHF Portable	Buah	1	-	1
90	Antenna VHF/FM Lainnya	Buah	3	3	
91	Peralatan Antenna VHF/FM Lainnya	Buah	1	1	
92	Antenna UHF Portable	Buah	1	1	
93	Antenna UHF Transportable	Buah	6	6	
94	Peralatan Antenna UHF Lainnya	Buah	3	3	
95	Antenna All Band	Buah	2	2	
96	Guy Tower	Buah	2	2	
97	Mast Tower	Buah	2	2	
98	Receiver Stl/UHF	Buah	2	2	
99	Power Distribution Board	Buah	8	8	
100	Lightning Protector	Buah	18	18	
101	All Band Receiver	Buah	7	7	
102	Rig Dual Band	Buah	6	6	
103	Peralatan Antenna Penerima VHF	Buah	3	3	
104	Peralatan Antenna Penerima UHF	Buah	3	3	
105	Peralatan Antenna Penerima SSHF	Buah	1	1	
106	Radio Direction Finder	Buah	1	1	
107	Unit Antenna Transceiver SHF Portable	Buah	6	6	
108	Genset	Buah	4	4	
109	Kursi Zeis	Buah	6	6	
110	Tiang Kesimbangan	Buah	4	4	
111	Tripod	Buah	2	2	
112	Rotator	Buah	1	1	
113	Dc Power Supply	Buah	1	1	
114	Uninterrupted Power Supply (UPS)	Buah	1	1	
115	Local Area Network (LAN)	Buah	2	2	
116	P.C. Unit	Buah	21	21	
117	Lap Top	Buah	30	30	
118	Plotter (Peralatan Mainframe)	Buah	2	2	
119	Hard Disk	Buah	4	4	
120	Speaker Komputer	Buah	6	6	
121	CPU (Peralatan personal Komputer)	Buah	2	1	1
122	Monitor	Buah	3	3	
123	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	18	18	
124	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	1	
125	Peralatan Personal Komputer Lainnya	Buah	6	6	
126	Server	Buah	3	3	
127	Ruter	Buah	13	13	

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi	
				Baik	Rusak
128	Hub	Buah	2	2	
129	Modem	Buah	2	2	
130	Rak Server	Buah	8	8	
131	Power Meter Untuk LF, HF, VHF, UHF	Buah	2	2	
132	Jet Purno	Buah	1	1	
133	Bak Penampungan/Kolam/Menara Penampungan	Unit	1	1	
134	Software Komputer	Buah	12	12	
135	Lisensi	Buah	1	1	

4). Jumlah dokumen Penatausahaan Kepegawaian UPT

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga salah satu fungsinya melaksanakan urusan ketatausahaan dan Rumah Tangga di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang. Dengan demikian pengelolaan dan penatausahaan kepegawaian serta kearsipan di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang menjadi tanggung Jawab Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Kegiatan yang terkait dengan penatausahaan dan pengelolaan kepegawaian diantaranya meliputi Pengembangan SDM melalui Diklat/Kursus/ Bimtek dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian diantaranya usulan kenaikan pangkat/kenaikan gaji berkala, usulan pemberian penghargaan, mutasi pegawai serta pengelolaan database kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang didukung oleh Sumber Daya Manusia sejumlah 27 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 21 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Nama Jabatan	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	CPNS	PPNPN	
1	Kepala UPT	1	-	-	1
2	Tata Usaha dan Rumah Tangga	7	-	18	25
3	Seksi Pemantauan dan Penertiban	15	-	2	17
4	Seksi Sarana dan Pelayanan	4	-	1	5
Jumlah		27	-	21	48

1. Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala

Bagi pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang yang telah memenuhi persyaratan diantaranya masa kerja dan ketentuan lain yang berlaku selama tahun 2020, telah diusulkan untuk mendapatkan kenaikan pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala, sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 25
Daftar Kenaikan Pangkat (KP) Pegawai Tahun 2020

No	Nama / NIP	Uraian Kenaikan Pangkat	TMT	Masa Kerja
1.	Saudi, ST, MM 197007051994031004	III.d Ke IV.a	01-04-2020	26 Tahun
2.	Sutarta 196907182003121002	II.d Ke III.a	01-04-2020	12 Tahun

Tabel 26
Daftar Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Pegawai Tahun 2020

No	Nama / NIP	Gol / Ruang	TMT	Masa Kerja
1.	Ir. Muhammad Sopingi, MM 196608261994031001	IV.b	03-01-2020	26 Tahun
2.	Supardi, SH, MH 196209071985031002	IV.a	01-03-2020	35 Tahun
3.	Edy Syukur, ST, MT 196203131990031001	IV.a	01-03-2020	30 Tahun
4.	Saudi, ST, MM 197007051994031004	III.d	01-03-2020	26 Tahun
5.	Japriansyah 196701121989031002	III.d	01-03-2020	31 Tahun
6.	Tarno, SH 196907182003121002	III.d	01-03-2020	30 Tahun
7.	Rully, A.Md 198203062006041002	III.b	01-04-2020	14 Tahun
8.	Slamat Rustandi 196510052007011006	II.b	01-01-2020	13 Tahun
9.	Sutarta 196907182003121002	III.a	01-12-2020	12 Tahun

2. Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi dan Umum

Dari 27 orang pegawai selain 4 orang yang ditunjuk dalam jabatan struktural, telah ditempatkan kedalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 27
Rekapitulasi Jumlah Fungsional Pengendali
Tahun 2020

Dari 27 orang pegawai selain 4 orang yang ditunjuk dalam jabatan struktural, telah ditempatkan kedalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum sebagaimana dalam tabel berikut: Jenis Jabatan	Jenjang Jabatan								Jumlah
	Ahli				Terampil				
	Pertama	Muda	Madya	Utama	Pemula	Pelaksana Lanjutan	Pelaksana Penyelia	Pelaksana	
Pengendali Frekuensi Radio	2	3	2	-	-	-	2	3	12

Tabel 28
Rekapitulasi Jumlah Fungsional Umum
Tahun 2020

No.	Nama Jabatan	Jenjang Jabatan			Jumlah
		Level			
		I	II	III	
1	Analisis Sumber Daya Monitor SFR	-	4	4	8
2	Pengendali Data Pemantauan dan Penertiban Radio	-	-	1	1
3	Pengendali Data Sarana dan Pelayanan	-	-	1	1
4	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	-	-	1	1
	Jumlah				11

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Untuk kepentingan penyidikan apabila terjadi pelanggaran penggunaan frekuensi radio, Balai Monitor SFR Kelas I Palembang memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tenaga/SDM untuk kelancaran pelaksanaan penyidikan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 29
Data PPNS Tahun 2020

No.	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	Status PPNS
1	Ir. Muhammad Sopingi, MM	Pembina Tk. I/IV.b	Kepala Balmon	Aktif
2	Salman, ST. MT. MH	Pembina/IV.a	Kasi Sarana dan Pelayanan	Aktif
3	Supardi, SH, MH	Pembina/IV.a	Kasi Pemantauan dan Penertiban	Aktif
4	Saudi, ST, MM	Pembina/IV.a	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Muda	Aktif
5	Firmansyah, SH. MH	Penata Tk. I/ III.d	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Muda	Aktif
6	Muchari, S.Kom	Penata Tk. I/ III.d	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Muda	Aktif
7	Tarno, SH	Penata Tk. I/ III.d	PPNS	Aktif
8	Berlan	Penata Tk. I/ III.d	Pengendali Frekuensi Radio Penyelia	Aktif

4. Pegawai menerima penghargaan

Bagi pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang yang telah memenuhi persyaratan diantaranya masa kerja dan ketentuan lain yang berlaku selama tahun 2020, telah diusulkan untuk mendapatkan Penghargaan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 30
Daftar yang Menerima Penghargaan Balai Monitor Kelas I Palembang
Tahun 2020

No	Nama	Gol/Ruang	Jenis Penghargaan
1.	Edy Syukur, ST, MT	IV.a	Satyalancana Karya Satya 30 Tahun
2.	Ilhamsyah, ST, MM	IV.a	Satyalancana Karya Satya 30 Tahun
3.	Firmansyah, SH, MH	III.d	Satyalancana Karya Satya 30 Tahun
4.	Slamet Suharto, ST, MM	III.d	Satyalancana Karya Satya 30 Tahun
5.	Muchari, S.Kom	III.d	Satyalancana Karya Satya 30 Tahun
6.	Berlan	III.d	Satyalancana Karya Satya 30 Tahun
7.	Tarno, SH	III.d	Satyalancana Karya Satya 30 Tahun
8.	Aria Dinata, S.Kom	III.b	Satyalancana Karya Satya 10 Tahun

5. Pegawai Purnabhakti

Bagi pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang yang telah memenuhi persyaratan diantaranya masa kerja dan ketentuan lain yang berlaku selama tahun 2020 pegawai purnabhakti pada Kantor Balmon Kelas I Palembang sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 31
Pegawai Purnabhakti
Tahun 2020

No.	Nama	NIP	Masa Kerja
1	Edy Syukur, ST, MT	196203131990031001	30 Tahun
2	Salman, ST, MT, MH	196206271989031002	30 Tahun
3	Supardi, SH, MH	196209071985031002	35 Tahun

6. Pegawai Mutasi Kerja

Bagi pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang yang telah mengusulkan mutase kerja selama tahun 2020, sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 32
Pegawai Mutasi Kerja

No.	Nama	Bulan	Mutasi Kerja
1	Berlan	April	Pangkalpinang

7. Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun bimbingan teknis (bimtek), merupakan bagian pelatihan dan pengembangan pengetahuan serta kemampuan sumber daya manusia yang dapat digunakan memecahkan masalah yang dihadapi oleh setiap individu maupun instansi tertentu. Sehingga dengan mengikuti diklat dan bimtek diharapkan setiap individu maupun instansi tertentu, baik swasta maupun lembaga pemerintahan, dapat mengambil sebuah manfaat dengan berorientasi pada kinerja.

Menghadapi kenyataan bahwa semakin tingginya tingkat kompetensi yang dibutuhkan, maka tentunya pendidikan pelatihan pengembangan sumber daya manusia ataupun bimtek telah menjadi sebuah kebutuhan untuk individu, instansi, ataupun lembaga pemerintahan. Dalam usaha meningkatkan kualitas SDM, maupun peningkatan kerjasama dengan instansi terkait, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang telah menugaskan para Pegawainya untuk mengikuti kegiatan pembinaan, konsultasi maupun koordinasi sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 33
Data Pegawai yang Mengikuti Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Workshop Tahun 2020

No.	Jenis Diklat/Bimtek/Sosialisasi	Jumlah Pegawai	Bulan Pelaksanaan	Metode Pelatihan
1	Principles Of Mobile Privacy	Agus Sumitro, S.Kom	April	Daring
2	Digital Identity For The Underserved	Halimatusa'dia, SE	Mei	Daring
3	Responding To The Disasters And Humanitarian Crises	Jefry Yogatama, ST	Mei	Daring
4	Spectrum Management For Mobile Telecommunications	Ade Andryani, ST	Mei	Daring
5	5G, The Path To The Next Generation	Debby Ayu Andina, A.Md	Mei	Daring
6	Pelatihan Foto dan Video	Sutarta	Agustus	Daring
7	Pelatihan Infografis	Sutarta	Agustus	Daring
8	Pelatihan Daring GSMA Tahap III	- Ade Andryani, ST - Debby Ayu Andina, A.Md	Agustus s.d. Oktober	Daring
9	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	Ade Andryani, ST	September	Daring

No.	Jenis Diklat/Bimtek/Sosialisasi	Jumlah Pegawai	Bulan Pelaksanaan	Metode Pelatihan
10	Pelatihan Pembentukan Pengendali Frekuensi Radio Tingkat Ahli	Ade Andryani, ST	November s.d. Desember	Daring
11	ORAN Interface And What The Impact For 4G dan 5G Network	- Saudi, ST, MM - Rully, A.Md	November	Daring
12	5G EDGE RAN And Architecture And Security	Agus Sumitro, S.Kom	November	Daring
13	5G End To End Concept	- Ade Andryani, ST - Debby Ayu Andina, A.Md	November	Daring

5). Sertifikasi ISO 9001:2015

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang melalui kerjasamadengan CV. Smart Consultant dan PECB telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 pada tahun 2018, dan pada tahun 2020 setelah dilakukan audit ulang PT. ENHAI MANDIRI 186 bahwa Balai Monitor SFR Kelas I Palembang dinyatakan masih memenuhi syarat untuk tetap memegang sertifikasi ISO 9001:2015.

Dengan adanya sertifikasi ISO 9001:2015, dapat dijadikan tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya para pengguna frekuensi yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mewujudkan terciptanya tertib penggunaan frekuensi sesuai dengan peruntukannya dengan tetap memperhatikan asas manfaat dan optimalisasi penggunaan frekuensi radio sebagai sumber daya yang sangat terbatas dan penting bagi negara.





C. ANALISA DAN EVALUASI

1. Capaian Kinerja Tahun 2020

- Secara umum kinerja pada Program Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio pada 17 kabupaten/Kota dapat dicapai sesuai dengan target/sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2020.
- Kinerja Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi yang bersih, efektif dan Efisien yang meliputi 1 (satu) indikator sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan IKPA Score 88,39%.

2. Perbandingan Data Capaian Kinerja Tahun 2016 s.d 2020

Tabel 34
Perbandingan Data Capaian Kinerja Tahun 2016 s.d 2020

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	2016		2017		2018		2019		2020	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Meningkatkan Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1 Presentase (%) Okupansi penggunaan frekuensi radio di Kabupaten/kota	Belum ada data	-	Belum ada data	-	Belum ada data	-	100,00%	100,00%	50,00%	152,00%
		2 Prosentase (%) pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja	80,00%	100,00%	35,00%	64,51%	35,00%	47,72%	85,00%	85,00%	35,00%	107,00%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	2016		2017		2018		2019		2020	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Meningkatkan Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	3 Persentase (%) jumlah ISR yang termonitor	Belum ada data	-	Belum ada data	-	Belum ada data	-	Belum ada data	-	60,00%	155,00%
		4 Persentase (%) hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi	Belum ada data	-	Belum ada data	-	Belum ada data	-	Belum ada data	-	90,00%	100,00%
		5 Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	Belum ada data	-	80,00%	100,00%	83,00%	90,00%	95,00%	100,00%	83,00%	117,00%
		6 Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable	Belum ada data	-	Belum ada data	-	Belum ada data	-	Belum ada data	-	12 Laporan	100,00%
		7 Persentase (%) penanganan gangguan spektrum frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritime	92,00%	100,00%	93,00%	100,00%	94,00%	100,00%	100,00%	64,00%	100,00%	100,00%
		8 Persentase (%) penertiban spektrum frekuensi radio	Belum ada data	-	80,00%	100,00%	81,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	200,00%
		9 Monitoring Perangkat Telekomunikasi	Belum ada data	-	Belum ada data	-	Belum ada data	-	100,00%	100,00%	1 Keg	5 Keg
		10 Persentase (%) peserta sosialisasi memahami informasi di bidang SDPPI	Belum ada data	-	Belum ada data	-	Belum ada data	-	85,00%	100,00%	80,00%	100,00%
		11 Pelaksanaan sertifikat operator radio berbasis CAT	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	600,00%	100,00%	100,00%
		12 Penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio	Belum ada data	-	Belum ada data	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	12 Laporan	100,00%
		13 Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL	100,00%	23,53%	100,00%	85,40%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	4 Laporan	100,00%
2.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif	14 Pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR	Belum ada data	-	80,00%	100,00%	83,00%	52,34%	85,00%	85,00%	85,00%	109,00%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Belum ada data	-	Belum ada data	-	Belum ada data	-	94,00%	96,80%	86,00%	102,00%



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang Tahun 2020 ini adalah upaya memberikan gambaran tentang capaian kinerja, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan baik kegiatan operasional terkait pelaksanaan tugas dan fungsi maupun kegiatan yang bersifat administratif. Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang dalam pelaksanaan Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan SFR serta penanganan gangguan frekuensi radio

Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang disusun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja (performance results).

Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2020 ini menampilkan berbagai capaian yang tercermin dalam indikator kinerja utama maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Secara umum Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang telah memenuhi target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kerjasama dan koordinasi yang lebih baik lagi, khususnya dengan instansi terkait baik internal maupun eksternal.
- b. Meningkatkan kemampuan SDM melalui kegiatan pembinaan, diklat, Bimtek dan workshop yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika maupun Ditjen SDPPI atau instansi lain yang berkompeten.
- c. Berupaya mengalokasikan penambahan anggaran untuk menambah kegiatan operasional yang setelah dievaluasi secara kuantitatif dianggap memerlukan penambahan kegiatan untuk mengoptimalkan kinerja, atau dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran/DIPA.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan juga dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja ini harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator indikator kinerja yang telah ada sesuai perkembangan tuntutan yang ada, sehingga Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang dapat semakin dirasakan keberadaan serta manfaatnya oleh masyarakat khususnya para pengguna frekuensi radio dengan tetap mengedepankan pelayanan yang profesional.



DOKUMENTASI



Pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang



Pembukaan Kejuaraan Nasional Tandoku Virtual Shorinji Kempo 2020



**Kegiatan Observasi dan Monitoring Spektrum Frekuensi Radio
di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang**



**Kegiatan Pengukuran Frekuensi Radio
di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang**



**Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio
di Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu**



**Pelaksanaan Sosialisasi Perijinan Radio Dinas Maritim
di Desa Sungsang, Kab. Banyuasin**



**Kegiatan General Medical Check Up dan rapid antigen
dilakukan oleh seluruh pegawai
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang**



**Kegiatan Peningkatan Disiplin Pegawai dan Pengembangan SDM
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang**



**Kegiatan Talkshow Terkait Sosialisasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang**



**Kegiatan Inspeksi Pengguna Frekuensi Radio Microwave Link
di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang**



**Kegiatan Penertiban Pengguna Frekuensi Radio
di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang**



**Kegiatan Pemeliharaan Perangkat Monitor
(Perbaikan rack perangkat mobil monitoring)
di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang**

